

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Tinjauan Pustaka 8

F. Kerangka Pemikiran 11

G. Metode Penelitian 17

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM, TEORI

LEMBAGA NEGARA DAN TEORI KEWENANGAN 23

A. Teori Negara Hukum 23

B. Teori Lembaga Negara 38

C. Teori Kewenangan 45

D. Teori Independensi 55

E. Teori Korupsi dan Pemberantasan Korupsi 63

BAB III INDEPENDENSI DAN KEWENANGAN KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA PERUBAHAN UU NOMOR

30 TAHUN 2002 TENTANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI 73

- A. Sejarah Lahirnya KPK 73
- B. Kedudukan KPK dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia
Sebelum dan Sesudah perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 79
- C. Independensi dan Kewenangan KPK Sebelum dan Setelah Perubahan
UU Nomor 30 Tahun 2002 87
- D. Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia 117
- E. Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dengan Negara lain 127

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 134

- A. Latar Belakang Terjadinya Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 134
- B. Independensi KPK Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 143
- C. Kewenangan KPK Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 155
- D. Dampak Independensi dan Kewenangan KPK Pasca Perubahan UU
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia..... 163

BAB V PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

